

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2003-2013, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa :

- a. Koefisien dana perimbangan sebesar 0,220 artinya bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 22%. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  dana perimbangan adalah 2,464 dan Jika dilihat dari tabel t, nilai  $t_{tabel}$  untuk dana perimbangan adalah 2,365 yang didapat dari rumus  $n-k (11-4) = 7$  dengan probabilitas  $0,05 : 2 = 0,025$ , maka diperoleh hasil bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,464 > 2,365$ , serta nilai signifikan uji t yang diperoleh dari variabel dana perimbangan  $<$  dari tingkat kepercayaannya ( $\alpha$ ) yaitu  $0,043 < 0,05$  maka, diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dana perimbangan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.
- b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,540 artinya bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 54%. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 9,649 dan Jika dilihat dari tabel t, nilai  $t_{tabel}$  untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 2,365 yang didapat

dari rumus  $n-k (11-4) = 7$  dengan probabilitas  $0,05 : 2 = 0,025$ , maka diperoleh hasil bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 9,649 > 2,365$ , serta nilai signifikan uji t yang diperoleh dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)  $<$  dari tingkat kepercayaannya ( $\alpha$ ) yaitu  $0,000 < 0,05$  maka, diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

- c. Koefisien Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 0,467 artinya bahwa setiap kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 46,7%. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah 2,500 dan Jika dilihat dari tabel t, nilai  $t_{tabel}$  untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah 2,365 yang didapat dari rumus  $n-k (11-4) = 7$  dengan probabilitas  $0,05 : 2 = 0,025$ , maka diperoleh hasil bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,500 > 2,365$ , serta nilai signifikan uji t yang diperoleh dari variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  $<$  dari tingkat kepercayaannya ( $\alpha$ ) yaitu  $0,043 < 0,05$  maka, diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.
- d. Nilai penyerapan belanja modal terhadap belanja daerahnya dalam periode penelitian ini memiliki trend yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 yaitu 16%, 20%, 23%, 26%, walaupun belanja

modal Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan persentase selama 4 tahun terakhir, ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi didalamnya, khususnya mengenai infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut data yang didapat oleh peneliti yaitu dari laporan evaluasi belanja modal daerah, permasalahan ini disebabkan oleh kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya SiLPA tahun sebelumnya, kemudian adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA *audited*, dan penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan (di atas bulan September) mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan dan merealisasikannya menjadi sangat terbatas sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian kegiatan.

- e. Hasil pengujian Nilia  $F_{hitung}$  dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah 214,230 dan Jika dilihat dari tabel F, nilai  $F_{tabel}$  untuk dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah 4,35 yang didapat dari rumus  $df1 = k-1$  (4 variabel - 1) = 3, dan  $df2 = n-k$  (11 sampel - 4 variabel) = 7, dengan probabilitas 0,05 maka diperoleh hasil bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel} = 214,230 > 4,35$ , serta nilai signifikan uji F yang diperoleh dari variabel dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) < dari

tingkat kepercayaannya ( $\alpha$ ) yaitu  $0,000 < 0,05$  maka, diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dana perimbangan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap belanja modal, serta nilai koefisien korelasi sebesar 0,995 artinya antara variabel X dan Y memiliki hubungan yang “sangat kuat”, serta memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,989 yang artinya 98,9% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, Sedangkan sisanya sebesar 1,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Dana perimbangan Pemerintah Kota Bandung yang telah dianggarkan, sebaiknya lebih dioptimalkan untuk alokasi belanja modal karena jika dilihat dari tahun anggaran terakhir dalam penelitian ini yaitu 2013 dana perimbangan masih tersisa 2,16% yaitu sekitar Rp 39.197.841.651,00 dari Rp 1.818.170.049.810,00 yang dianggarkan agar pencapaian target belanja modal lebih optimal.
- b. Pemerintah daerah Kota Bandung harus memiliki sikap yang optimis dalam hal penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mengingat hal tersebut masih dalam control penuh daerah. Utamanya dalam mengoptimalkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena jika

dilihat dari APBD tahun 2013 masih belum tercapai targetnya, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai dengan optimal.

- c. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya berusaha untuk mencapai pelampauan-pelampauan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan melakukan penghematan belanja oprasi, namun harus meminimalisir terjadinya penundaan belanja modal, karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebaiknya digunakan untuk belanja modal yang dapat meningkatkan pelayanan publik.
- d. Perlu mengusulkan secara resmi kepada Kementrian Dalam Negeri untuk menyusun ketentuan (Permendagri) yang mengatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu hasil audit realisasi APBD tahun sebelumnya sehingga APBD-P setiap tahunnya dapat dilakukan sebelum bulan Mei, agar realisasi penyerapan dan kualitas penyelesaian kegiatan dalam belanja modal bisa lebih tinggi dengan jangka waktu yang senggang.
- e. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel, sampel, dan tahun anggarannya.